

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. Muslim, M. Rusmiyati, S dan Wibisono, S., 2002 *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia*, Jakarta. Hal. 74-75.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi sektor publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2011, *Metodologi Penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muluk, Khairul M., 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Its Press, Surabaya.
- Nasucha, Y. Rohmadi, M dan Wahyudi, Agus B., 2009, *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Media Perkasa, Yogyakarta.
- Pramita, Yulinda D dan Andriyani, L., 2010, *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII Purwokerto, 13-14 Oktober 2010 di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Rahayu, S. Ludigdo, U dan Affandy, D., 2007, *Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan APBD Bukti Empiris di SKPD Provinsi Jambi*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X Makasar, 26-28 Juli 2007 di Universitas Hasanudin Makasar.
- Sisk, Timothy D. 2002 *Demokrasi ditingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan*, Seri 4, Internasional IDEA, Jakarta, hal. 189.
- Sopannah, 2009, *Studi Fenomologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XII Palembang, 4-6 November 2009 di Universitas Sri Wijaya Palembang.
- Sopannah, 2010, *Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah Studi Interpretif*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII Purwokerto, 13-14 Oktober 2010 di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung.

Werimon, S. Ghozali, I dan Nazir, M., 2007, *pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X Makasar, 26-28 Juli 2007 di Universitas Hasanudin Makasar.

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Via Internet:

<http://www.surakarta.go.id> diakses tanggal 29 April 2012

http://www.id.wikipedia.org/wiki/kota_Surakarta diakses tanggal 29 April